

## RINGKASAN

Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan SDI Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala dan potensi pengembangan kebijakan Satu Data Kabupaten Banyumas.

Kajian pustaka penelitian ini mengadopsi kajian implementasi kebijakan model Smith (1973) dan *street level bureaucracy* oleh Lipsky (1983) yaitu aspek *idealized policy*, *implementing organization*, *target groups*, dan *social dynamics*. Dalam aspek *idealized policy* terdiri dari sub aspek pemahaman, tujuan, sejauh mana implementasi kebijakan, dan kendala. Dalam aspek *implementing organization* terdiri dari sub aspek struktur organisasi, komunikasi, perlindungan terhadap keamanan data, serta pengawasan dan evaluasi. Dalam aspek *target groups* terdiri dari sub aspek pemberdayaan dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam aspek *social dynamics* terdiri dari sub aspek peran masyarakat dan dampak sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode interaktif Miles Huberman (1994). Informan penelitian yaitu masyarakat, Ketua Komisi I DPRD, OPD/instansi (produsen data, wali data, pembina data, dan koordinator SDI) Kabupaten Banyumas. Teknik validitas dan reliabilitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek *idealized policy*, sudah ada regulasi namun implementasinya masih ditemukan kendala. Dalam aspek *implementing organization*, struktur belum terdefinisi dengan jelas, komunikasi sudah aktif dilakukan, sudah ada upaya perlindungan keamanan data, serta ada proses pengawasan dan evaluasi berkala melalui Forum SDI. Dalam aspek *target groups*, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih kurang karena pembinaan belum intens dilakukan. Terakhir, dalam aspek *social dynamics*, terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan data maupun memberikan kritik dan masukan melalui survei, tetapi kemanfaatan kebijakan SDI belum dirasakan oleh masyarakat luas

Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas berpedoman pada regulasi yang ditetapkan. Ditemukan kendala seperti kurangnya kualitas data, portal website belum optimal, kurangnya kualitas sumber daya manusia, sistem *automated data integration* belum efektif, struktur OPD/instansi belum terdefinisi, belum ada pemberdayaan, serta kemanfaatan belum dirasakan masyarakat luas. Sementara itu, terdapat potensi pengembangan seperti dukungan regulasi yang terus diperbaiki, komitmen keberlanjutan dan pengembangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Implikasi secara umum adalah kebijakan SDI perlu dimasukkan ke dalam RPJPD Kabupaten Banyumas. Selain itu, implikasi dari keempat aspek yaitu segera menetapkan regulasi terbaru, mengatur struktur organisasi yang terdefinisi, menjaga komunikasi aktif, meningkatkan keamanan data, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan *automated data integration* serta partisipasi aktif masyarakat.

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Open Government Data, Satu Data Indonesia, Satu Data Kabupaten Banyumas

## SUMMARY

Government needs to improve governance data management at the level of the central government as well as the local government are the background of the government's establishment of the Satu Data of Indonesia (SDI) policy. This research focuses on "Implementation of SDI Policy at the Government Level of Banyumas Regency". The aim is to identify the obstacles and potential development of one data policy of Banyumas Regency.

The study of the research library adopted the Smith model policy implementation study (1973) and street level bureaucracy by Lipsky (1983) as aspects of idealized policy, implementing organization, target groups, and social dynamics. In idealized policy aspects consist of sub-aspects of understanding, objectives, the extent to which policy implementation, and constraints. In the implementing organization aspect, it consists of sub-aspects of organizational structure, communication, protection of data security, as well as monitoring and evaluation. In the target group aspect, the human resources empowerment and availability components.

This research uses qualitative methods using purposive sampling techniques with data collection through interviews, observations, and documentation analyzed using Miles Huberman's interactive method. (1994). Research informants are the public, Chairman of the Commission I of the DPRD, OPD/instance (data producer, data guardian, data builder, and SDI coordinator) of Banyumas Regency. The validity and reliability techniques used are source triangulation. The findings of the research show that in the aspect of idealized policy, regulation already exists but implementation still finds obstacles. In terms of implementing organization, the structure has not been clearly defined, communications have been actively carried out, data security protection efforts have been made, and there is a process of monitoring and evaluation through the SDI Forum. In the terms of target groups, the quantity and quality of human resources is still lacking because the construction is not yet intensive.

The conclusion of this study is that the SDI policy in Banyumas Regency is guided by the established regulations. Obstacles such as lack of data quality, website portal is not optimal, lack of quality of human resources, automated data integration system is not effective, OPD/instance structure is not defined, there is no empowerment, and utility is not felt by the general public. Meanwhile, there is potential for development such as continuously improved regulatory support, commitments to sustainability and development, and active public participation. The general implication is that the SDI policy needs to be incorporated into the Banyumas Regency RPJPD. Furthermore, the implications of the four aspects are promptly establishing the latest regulations, regulating defined organizational structures,ining active communication, improving data security, empowering human resources, enhancing automated data integration and active participation of the public.

**Keywords :** Public Policy, Public Policy Implementation, Open Government Data, Satu Data of Indonesia, Satu Data of Banyumas Regency